

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Merujuk pada keterangan dari hasil temuan penelitian berupa data-data yang dianalisis secara sistematis dalam pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya; yang berdasarkan fenomena-fenomena penting di lapangan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Faktual Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, secara faktual kondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di kota cimahi sudah berjalan sesuai dengan digulirkannya Permendiknas nomor 70 tahun 2009, peraturan itu menjadi penggagas serta berjalan beriringan dengan dihasilkannya Perwalkot Cimahi tentang PK-PLK dan deklarasi Kota Cimahi menjadi kota inklusif. saat ini penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah mulai tersebar di beberapa kecamatan dan/atau kelurahan yang ada dalam wilayah administratif Kota Cimahi; diasumsikan dengan 3 sekolah dasar sebagai sekolah sumber dukungan yang mewakili dan terletak di tiap-tiap kecamatan di Kota Cimahi.; artinya secara amanat peraturan itu sudah di operasionalisasikan oleh para aparat pelaksana secara bersama-sama. Yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh para pemangku kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah, yakni Dinas Pendidikan Kota Cimahi melalui penyusunan dan perumusan petunjuk teknis tentang implementasi pendidikan inklusif. namun hingga saat ini belum ada pelaksana yang cara khusus dan professional menangani pendidikan inklusif, hal

ini terjadi walaupun sudah terbentuknya kelompok kerja (Pokja) inklusi, tetapi itu menandakan bahwa penanganan pendidikan inklusif di Kota Cimahi masih secara umum; sehingga secara proses pengembangan dan pemerataan sekolah dasar inklusif berjalan dengan kecenderungan apa adanya. Ditambah dengan kelompok kerja inklusi cukup mengalami hambatan dalam proses/garis koordinasi dan komunikasi dengan sekolah pusat sumber maupun sekolah dasar sumber dukungan, hal itu menyebabkan terjadinya stagnansi pada bentuk pengawasan, pengendalian dan kontroling. Dengan demikian implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Cimahi secara umumnya belum tepat pada sasaran seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pemerataan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya pada jenjang sekolah dasar sudah cukup dalam keterlaksanaannya, yang mesti dilakukan berikutnya adalah membuat program-program teknis di sekolah yang dapat memberikan stimulus terkait pengembangan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dari Realisasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi.

Realisasi kebijakan pendidikan inklusif yang terjadi pada jenjang sekolah dasar, serta mengacu pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidik inklusif di Kota Cimahi selain mendapatkan respon baik berupa dukungan, juga dihadapkan pada beberapa hambatan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti diuraikan berikut ini :

a. Faktor Pendukung

- 1) Pola pelaksanaan dan perkembangan pendidikan inklusif di Kota Cimahi telah berjalan progresif dengan memperoleh respon yang baik

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

berupa dukungan dari pemerintah provinsi baik secara finansial dan fasilitas.

- 2) Dengan diterbitkannya Pergub Jawa Barat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai bentuk dukungan nyata dan tindak lanjut dari Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.
- 3) Hadirnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan deklarasi Kota Cimahi sebagai salah satu Kota Inklusif, menunjukkan bahwa keberpihakan pemangku kebijakan terhadap potensi layanan pendidikan yang ramah dan mengakomodasi kebutuhan semua anak tanpa terkecuali, merupakan langkah yang positif dan membuat terbentuknya dukungan yang nyata dari masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kebijakan pendidikan di Kota Cimahi belum secara menyeluruh mendukung kebijakan provinsi Jawa Barat tentang pendidikan inklusif, yakni perda khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- 2) Belum tersusunnya petunjuk teknis dan desain implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar dan umumnya yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan sebagai penunjang keterlaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi.
- 3) Belum adanya sumber daya khusus yang menangani bidang pendidikan inklusif di Kota Cimahi, terutama di Dinas Pendidikan.
- 4) Masih kurangnya pemanfaatan sistem teknologi informasi atau manajemen informasi, padahal cukup memadai sebagai upaya melakukan koordinasi dan komunikasi antar institusi; sekaligus sebagai wadah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

- 5) Kondisi wilayah administratif Kota Cimahi yang terbagi dalam tiga kecamatan dan memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sekolah-sekolah dasar di kecamatan cimahi selatan yang cenderung mengalami kendala pada akses informasi dan komunikasi antar pelaksana.
- 6) Masih cukup banyak aparat pelaksana di lapangan yang belum memahami secara utuh isi, maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan apa saja yang mesti dilakukan.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar dalam pelaksanaannya di sekolah-sekolah dasar inklusi telah dilakukan dengan berbagai sosialisai dan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait namun hal tersebut belum berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan belum adanya pemangku kebijakan di dinas pendidikan yang menangani secara khusus terkait pendidikan inklusif seperti yang di amanatkan pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dimana dilamanya tertuang penjelasan tentang pihak pengelola, hal itu berimbah pada kekurangannya aparat pelaksana yang berada di sekolah-sekolah inklusi. Padahal pihak pemerintah pusat telah menyediakan dan menyiapkan berbagai sumber daya manusia serta sumber daya material sebagai pendukung dalam realisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara keseluruhan telah dikembangkan upaya-upaya formal maupun informal dalam kesatuan struktur dan lingkungan birokrasi. Selain itu faktor sikap dari pelaksana dan dukungan masyarakat juga menjadi modalitas utama dalam upaya pemerataan pendidikan inklusif dan sekolah inklusi, meskipun secara umum para aktor pelaksana individu atau kelompok sasaran yang ada di sekolah-sekolah dasar itu belum cukup memahami secara utuh isi dan tujuan dari kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang diturunkan menjadi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

inklusif; namun mereka telah menunjukkan penerimaan dan konsistensi dukungannya terhadap implementasinya. Hal ini dianggap dapat memberikan dampak positif bagi keterlaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi karena berkaitan dengan layanan pendidikan bagi seluruh anak di masing-masing sekolahnya.

3. Model Hipotetik Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi.

Model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar dirumuskan dengan memperhatikan berbagai variabel, variabel yang krusial adalah aktifitas pendidikan inklusif dan komunikasi antar organisasi yang harus terintegrasikan dengan perpaduan antara lima aktivitas kebijakan, yaitu (a) mendorong penyusunan dari peraturan daerah khusus tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif; (b) mempercepat penyusunan dan perumusan operasional teknis pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan pada kondisi kewilayahan; (c) optimalisasi dalam pembentukan tim koordinasi pendidikan inklusif yang berintegritas dan kompeten sebagai pelaksana tugas agar dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien; (d) memperkuat sistem teknologi dan informasi dalam manajemen informasi yang berkaitan dengan pemetaan pendidikan inklusif; (e) prosedural penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus dilingkungan terdekat dengan sekolah-sekolah yang ada di setiap kelurahan. Kemudian untuk melihat hasil kinerja pemerataan pendidikan inklusif dan sekolah inklusi dari aktivitas implementasi yang ada maka variabel lainnya harus diperhatikan seperti ukuran dan tujuan pemerataan pendidikan inklusif, karakteristik badan pelaksana, sikap aparat pelaksana, sumber daya, kondisi dari pendidikan inklusif baik dari aspek sosial, politik, ekonomi pun budaya kewilayahan. Secara keseluruhan dari variabel model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

hasur sinergis dan terintegrasi untuk memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan seperti yang tertuang dala Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 sebagai perwujudan pemerataan pendidikan inklusif dan sekola inklusi.

4. Hasil *Expert Judgment* Terhadap Model Hipotetik Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi.

Penyusunan model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi sangat penting dilakukan mengingat hingga saat ini model implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang sudah berjalan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian perumusan desain yang mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian atau kinerja dari kebijakan pendidikan inklusif, selain itu dengan hadirnya sebuah desain hipotetik, maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai program dan agenda implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu penyusunan model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi perlu dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam ketercapaian kebijakan yang ada di lapangan. Dalam penyusunan tentu melibatkan berbagai pihak yang termasuk didalamnya para ahli yang berkompeten dan kredibel di bidang kebijakan pendidikan dan pendidikan inklusif dapat memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ditemukan beberapa permasalahan yang tentunya perlu penanganan khusus dan dilakukan langkah antisipasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul dikemudian hari terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi serta keterlaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi.

Adapun rekomendasi penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan, yaitu masih banyak terdapat beberapa aparat pelaksana yang belum memahami secara utuh isi, maksud dan tujuan dari kebijakan pendidikan inklusif dan apa saja yang harus dilakukan terkait pemetaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lapangan, maka disarankan untuk merumuskan dan menyusun model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar sedini mungkin yang sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di tiap-tiap sekolah dasar inklusi di Kota Cimahi. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dengan memperhatikan hal-hal berikut ini : Untuk memastikan peluang keberhasilan dan tercapainya tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka strategi implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut harus terpola dengan sinergis dan simultan antara aktivitas-aktivitas dan variabel-variabel implementasi yaitu (a) mendorong penyusunan dari peraturan daerah khusus tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif; (b) mempercepat penyusunan dan perumusan operasional teknis pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan pada kondisi dan karakteristik sekolah inklusif; (c) optimalisasi dalam pembentukan tim koordinasi pendidikan inklusif yang berintegritas dan kompeten sebagai pelaksana tugas agar dapat

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

memberikan kinerja yang efektif dan efisien; (d) Membuat program-program sistematis berupa penyuluhan atau bimbingan teknis yang bermutu bagi tenaga kependidikan yang secara langsung bersentuhan dengan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah; (e) memperkuat sistem teknologi dan informasi dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pemetaan pendidikan inklusif dalam penyediaan sarana perangkat teknologi seperti pengadaan jaringan *wi-fi*, teknologi dalam pembelajaran, teknologi bagi akses profil sekolah (data base) yang menunjang di sekolah inklusif; (f) mempersiapkan aksesibilitas sarana dan prasarana, seperti infrastuktur bangunan dan jalan di sekolah, ruang kelas bagi pelayanan khusus, tersedianya alat-alat khusus penunjang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar tersebut secara garis besar dapat menyentuh pengembangan pendidikan inklusif yang di implementasikan di Kota Cimahi. Dalam tataran implementasinya yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar inklusi. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan aparatur di setiap kecamatan atau keluarahan masing-masing, hal itu diperbolehkan sebagai dasar informasi bagi perencanaan di tingkat pemerintahan daerah untuk menghitung keberadaan dan kebutuhan di tiap-tiap komponen yang ada, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembagian alokasi sumber daya di masing-masing wilayah, termasuk di dalamnya kebutuhan yang khusus dalam mengakomodasi karakteristik budaya wilayah yang terdapat sekolah-sekolah inklusif dan secara spesifik tentunya memerlukan penanganan secara khusus.

Pemerintah selaku pemangku kebijakan diharapkan dapat memperhatikan kinerja pemerataan pendidikan inklusif dengan melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan kontroling terhadap setiap program-

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

program kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pun menyediakan sumber daya yang profesional dan kompeten di dinas pendidikan yang bertugas sebagai aparat pelaksana, sehingga memungkinkan penanganan dan optimalisasi pendidikan inklusif yang berdampak positif.

2. Belum adanya sumber daya yang menangani secara khusus tentang pendidikan inklusif di dinas pendidikan kota cimahi yang berimbas pada kurangnya aparat pelaksana di sekolah-sekolah inklusi, maka disarankan untuk membentuk tim koordinasi dan komunikasi dan menjalankan kembali fungsi kelompok kerja inklusi sebagai pelaksana kebijakan yang bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif.
3. Mengoptimalkan penyusunan serta mendorong terbentuknya peraturan daerah yang bersifat khusus tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, karena hal itu sebagai dukungan dan tindak lanjut terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sehingga menjadi pedoman bagi para praktisi pendidikan di lapangan secara umumnya dan praktisi pendidikan yang berada sekolah-sekolah inklusi secara khususnya dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
4. Peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini sifatnya analitik terhadap fenomena yang terjadi pada dinas pendidikan dan sekolah dasar inklusi, sehingga hasilnya belum menggambarkan keberhasilan pendidikan inklusif. untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas implemementasi kebijakan pendidikan inklusif yang lebih luas lagi sebagai bahan kajian penelitian, diskursus ilmiah mahasiswa, pun dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dasar tentang pendidikan inklusif serta model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai upaya pemerataan pendidikan inklusif dan sekolah inklusi.

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

ROBIANSYAH. STU, 2017

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH
DASAR DI KOTA CIMAHI*

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu